



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
KECAMATAN DUA BOCCOE
KABUPATEN BONE**

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Kecamatan Dua Boccoe Tahun 2021 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Kecamatan Dua Boccoe Tahun 2021 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun keempat dalam masa RENSTRA Tahun 2018.-2023. LKjIP Tahun 2021 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2018-2023).

LkjiP Kecamatan Dua Boccoe disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 serta Peraturan Bupati Bone Nomor 1 Tahun 2016 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bone. Penyusunan LKjIP Kecamatan Dua Boccoe Tahun 2021 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Dua Boccoe. Komitmen dalam penyusunan LKjIP Kecamatan Dua Boccoe, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Dua Boccoe untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya. Cakupan LKjIP Kecamatan Dua Boccoe



Tahun 2021 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan Penutup. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti: Latar belakang, isu strategis, dan Aspek Strategis Organisasi di Kecamatan Dua Boccoe Adapun aspek Perencanaan Kinerja menggambarkan tujuan dan sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian kinerja organisasi, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Kecamatan Dua Boccoe pada tahun 2021, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumber daya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Kecamatan Dua Boccoe Tahun 2021 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 2 indikator kinerja utama, terdapat 2 indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKjIP Kecamatan Dua Boccoe Tahun 2021 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Uloe,, 9 Februari 2021
Camat Dua Boccoe



AND MUSAFIR, S. Pi
Pangkat: Pembina
NIP.19720304201001



IKHTISAR

Kecamatan Dua Boccoe sebagai perangkat daerah Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan untuk melaksanakan Tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Dua Boccoe diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

Kecamatan Dua Boccoe secara bertahap bermaksud melaksanakan tugas pokok sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat secara prima dengan menerapkan prinsip clean government dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada secara optimal baik sumber daya manusia dan sarana prasarana sesuai dengan visi kantor Kecamatan Dua Boccoe.

Selanjutnya, guna mewujudkan pertanggungjawaban pencapaian kegiatan dan aspek keuangan yang berasal dari APBD Kabupaten Bone Tahun 2021 secara akuntabel dan transparan, maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Dua Boccoe tahun 2021, yang berupa kegiatan



Bidang Pemerintahan, Bidang Keamanan dan Ketertiban umum, Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Bidang Kesekretariatan, dengan biaya sebagaimana berikut:

1. Belanja Operasi : Rp. 11.782.942.269
2. Belanja Modal : Rp. 21.873.000

Uloe, 9 Februari 2021

Camat Dua Boccoe



ANDI MUSAFIR, S. Pi

Pangkat: Pembina

NIP.1972030420100



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

IKHTISAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM	1
B. ORGANISASI	2

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. TUJUAN DAN SASARAN	8
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	9
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	10
D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	12
E. STANDAR PENILAIAN KINERJA	14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	15
B. REALISASI ANGGARAN.....	17
C. REALISASI KINERJA YANG MENGACU TARGET JANGKA MENENGAH.....	19
D. REALISASI KINERJA DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL/STANDAR NASIONAL LAINNYA	20
E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN.....	21
F. ANALISIS ATAS EFESIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	26
G. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN.....	28

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM.....	41
B. KENDALA PELAKSANAAN DAN UPAYA MENGATASI.....	41





BAB I

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi system Akuntabilitas Kineerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Bone Nomor 1 Tahun 2016 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bone.

Mengacu kepada Peraturan Peraturan Bupati Bone Nomor 1 Tahun 2016 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bone, LKj tingkat Perangkat Daerah disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.



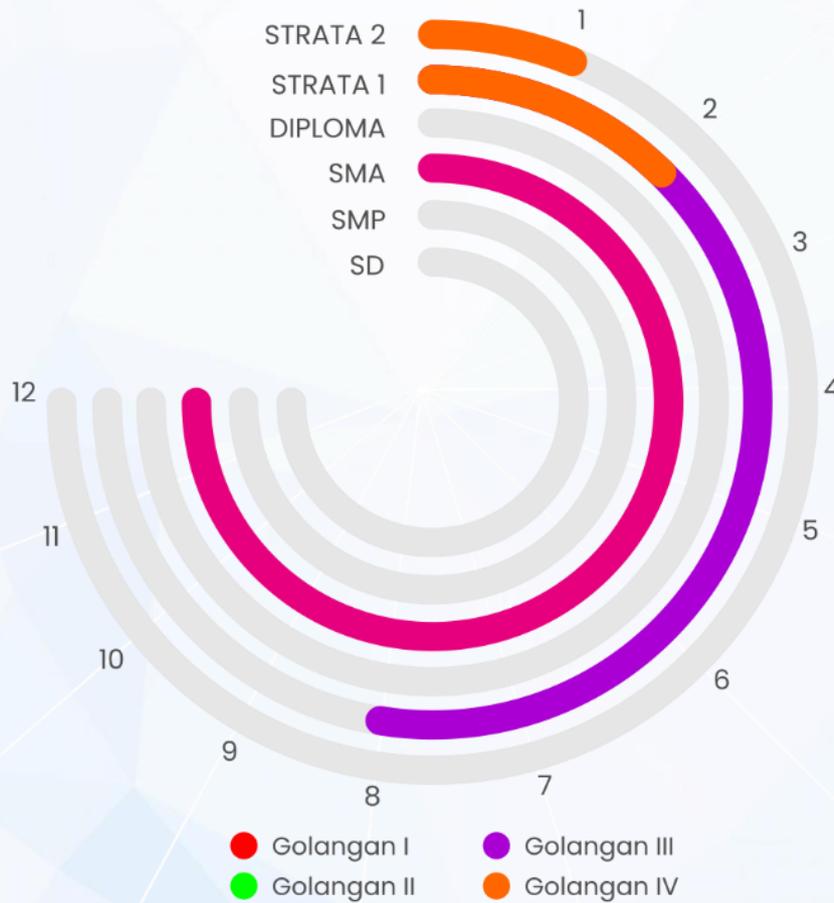
B. ORGANISASI

Pembentukan Kecamatan Dua Boccoe tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Dua Boccoe diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tugas pokok dan fungsi Kecamatan yaitu sebagai berikut:

PEMETAAN DAN IKHTISAR JABATAN KANTOR CAMAT DUA BOCCOE



KOMPOSISI SDM ORGRANISASI KECAMATAN DUA BOCCOE

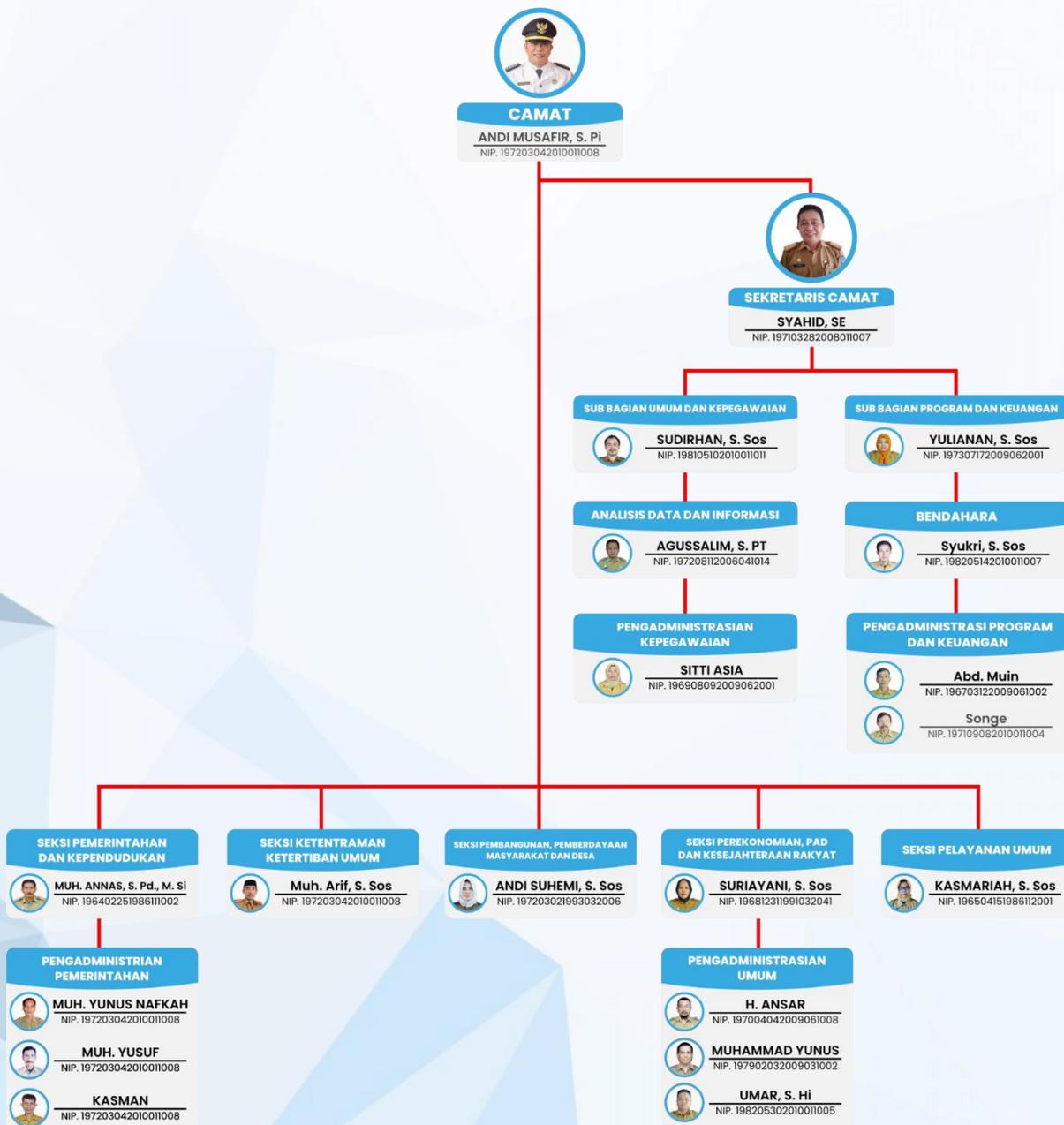


Sumber Data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kec. Dua Bocoe

1. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Kecamatan Dua Boccoe diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2016 berlaku tanggal 1 Januari 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan memiliki susunan orgnaisasi sebagai berikut :

STRUKTUR ORGRANISASI KANTOR CAMAT DUA BOCCOE



Sumber Data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kec. Dua Boccoe Tahun 2021

Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Camat Dua Boccoe secara lengkap dapat diakses dengan memindai QR Barcode berikut:



2. ISU STRATEGIS

Melihat gambaran permasalahan pembangunan di tingkat Kecamatan, dan memperhatikan faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan, maka dapat dirumuskan isu strategis yang dihadapi Kecamatan Dua Boccoe adalah sebagai berikut:

- a. Reformasi Birokrasi, SDM aparatur yang tersedia di Kecamatan Dua Boccoe sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi produktivitas aparatur.
- c. Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan.
- d. Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah.
- e. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Sustainable Development Goals (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi, Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga Tahun 2030 yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015

f. Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus 2019 (COVID-19) yang dialami oleh seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh sindrom pernapasan akut parah coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Virus itu dipastikan menyebar ke Indonesia pada 2 Maret 2020, dan pada tanggal 9 April, pandemi telah menyebar ke 34 provinsi di Indonesia. Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat adalah provinsi yang terkena dampak terparah. Hingga 14 November di Indonesia telah dilaporkan terjadi 463.007 kasus, tertinggi di Asia Tenggara, di atas Filipina. Dalam hal jumlah kematian, Indonesia menempati urutan ketiga di Asia dan ke-15 di dunia. Meskipun demikian jumlah kematian mungkin jauh lebih tinggi daripada yang dilaporkan karena mereka yang meninggal dengan gejala COVID-19 akut tetapi belum dikonfirmasi atau diuji tidak dihitung dalam angka kematian resmi. Pandemi corona virus (Covid-19) menimbulkan setidaknya tiga dampak terhadap perekonomian Indonesia, yaitu penurunan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pengangguran, dan peningkatan kemiskinan. Sejak COVID-19 menyebar ke Indonesia, hampir seluruh sektor menerima dampak negatifnya, tidak hanya sosial, kesehatan dan pendidikan, tetapi sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona ini. Pembatasan aktivitas masyarakat, berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Agustus menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 minus 5,32 persen. Sebelumnya, pada kuartal I 2020, BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97 persen, turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5,02 persen pada periode yang sama 2019 lalu. Kinerja ekonomi yang melemah ini turut pula berdampak pada situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Terhambatnya aktivitas perekonomian secara otomatis membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian, sehingga banyak

pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan (PHK). Apabila resesi terus berlanjut, diperkirakan akan berdampak secara riil pada masyarakat dalam hal penurunan pengeluaran konsumsi masyarakat, sehingga mendorong potensi penambahan penduduk rentan miskin dan miskin.

3. ASPEK STRATEGI ORGANISASI

Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana telah dirumuskan di atas, maka ditetapkan strategi pembangunan Kecamatan Dua Boccoe sebagai Berikut:

1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui penyediaan sarana prasarana pemerintahan umum bagi pengembangan Aparatur sipil Negara (ASN)



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. TUJUAN DAN SASARAN

Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah kecamatan merupakan pernyataan yang menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023 yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan Rencana Strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (Tiga) tahun. Dengan ditetapkannya Tujuan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Dua Boccoe, maka Kecamatan Dua Boccoe dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tabel 2.1
Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra Kec.Dua Boccoe 2019-2023

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi awal Tahun 2020	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
					2021	2022	2023
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kecamatan Dua Boccoe	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	B	B	B	BB
			Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan (%)	94	96	98	100

Sumber Data : Renstra Perubahan Kec. Dua Boccoe 2018-2023

B. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi

Strategi adalah suatu rencana untuk mencapai tujuan tertentu yang disusun sedemikian rupa oleh suatu organisasi sesuai dengan misi yang hendak diraihinya sekaligus untuk melaksanakan mandat/tugas-tugas yang diembannya dengan mempertimbangkan pengaruh faktor-faktor lingkungan eksternal maupun internal.

Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan

Gambar : Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan

Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI I : MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA				
MISI I : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN.				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Dua Boccoe	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Mengoptimalkan tugas dan fungsi melalui perbaikan manajemen Perangkat Daerah Optimalisasi Pelayanan Kepada Masyarakat	Mengembangkan system operasional prosedur pelayanan dan tata laksana unsur penunjang pemerintahan umum.

Sumber Data : Rencana Strategis Perubahan Tahun 2021

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Dua Boccoe ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bone Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone.

Tabel 2,2
IKU Kecamatan Dua Boccoe Tahun 2018

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas Pelayanan Publik	1. Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan	Data	$\frac{\text{Jumlah pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan}}{\text{jumlah permohonan pelayanan oleh masyarakat}} \times 100$	Data Pelayanan
	2. Presentase pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindak lanjuti/diselesaikan	Laporan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan pelayanan public yang masuk}}{\text{jumlah pengaduan pelayanan public yang ditindak lanjuti/diselesaikan}} \times 100$	Data Pengaduan Pelayanan
	3. Presentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat	usulan	$\frac{\text{Jumlah usulan kegiatan pembangunan masyarakat}}{\text{usulan hasil}}$	Berita Acara Musrembang dan APBD

	hasil musrembangcam dapat disetujui ditingkat kabupaten		musrembangcam yang disetujui ditingkat kabupaten -----X 100 jumlah seluruh usulan kegiatan pembangunan masyarakat hasil musrembangcam yang diusulkan pada musrembangkab	
4. Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	1. Presentase gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	kasus	Jumlah gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan -----X 100 jumlah gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang masuk	Laporan Jumlah gangguan Tramtibmas
	2. Presentase penurunan pelanggaran terhadap Perda	Kasus	Jumlah pelanggaran perda Tahun (n-1) dikurang jumlah pelanggaran perda Tahun (n) -----X 100 jumlah pelanggaran perda Tahun (n)	Data laporan pelanggaran perda dan perundang-undangan lainnya

Tabel 2,3
IKU Perubahan Kecamatan Dua Boccoe Tahun 2021

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TAHUN			
				2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kecamatan Dua Boccoe	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	B	B	B	BB
			Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan (%)	94	96	98	100

Sumber Data : Renstra Perubahan Kec. Dua Boccoe Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Dua Boccoe ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bone Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone.

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disepakati bersama antara penerima dan pemberi amanah dan merupakan ikhtisar

Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Kecamatan Dua Bocoe Tahun 2021

N O	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGE T	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		3	4	5	6
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP Presentase pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan	B 94	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.10.809.386.933
					PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.11.549.500
					PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.239.991.001
					KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 33.000.000
					PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 33.135.000
Jumlah						Rp. 11.804.815.269

Sumber: RENSTRA Perubahan Kec. Dua Bocoe Tahun 2021

Perjanjian Kinerja secara lengkap dapat diakses dengan memindai QR Barcode berikut:



E. STANDAR PENILAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi instansi pemerintah.

Standar penilaian kinerja terhadap laporan kinerja perangkat daerah merupakan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Kecamatan Dua Boccoe, maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel Standar Penilaian Kinerja

Nilai %	Pencapaian
> 100	Sangat tercapai/Sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai/Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai/Cukup berhasil
$x < 60$	Tidak Tercapai/Tidak berhasil

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah:

$$\text{Capaian Indikator Kerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Kecamatan Dua Boccoe menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Kecamatan Dua Boccoe dengan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Dua Boccoe. Pengukuran kinerja Kecamatan Dua Boccoe dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja setiap indikator tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Capaian indikator kinerja tujuan/sasaran atas perjanjian kinerja di atas mengacu pada tujuan/sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Dua Boccoe meliputi:

Tujuan 1

- Meningkatkan Akuntabilitas Kecamatan Dua Boccoe

indikator :

- Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP

Sasaran 1.1

- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

indikator: Presentase Pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan

Untuk setiap pernyataan kinerja tujuan/sasaran strategis tersebut di atas dilakukan analisis capaian kinerja tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Kinerja	Ket
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kecamatan	Hasi Evaluasi Sakip oleh APIP	B	B	100 %	Mencapai Target
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Presentase pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan	96	94,43	98,36 %	Mencapai Target

Sumber: Renstra Perubahan Kec Dua Boccoe Tahun 2021

Berdasarkan table 3.1 Capaian Indikator Kinerja Tujuan Yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Kecamatan Dua Boccoe, Dapat Diketahui bahwa realisasi target pada Indikator Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP dengan Capaian 100% Mencapai Target Capaian Indikator ini di peroleh dari Nilai Predikat Sakip berdasarkan Hasil Evaluasi Sakip Oleh Inspektorat Daerah selaku APIP. Capaian ini di kategorikan Mencapai Target. Dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pablik tersebut di atas, dapat diketahui bahwa realisasi dari Presentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dengan capaian 98,36 % (*mencapai Target*)

Pelayanan Pablik tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama yaitu Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP dengan Capaian 100%. Capaian ini dikategorikan Tercapai/Berhasil. Dan

Presentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dengan capaian 98,36 % *%(Tercapai/Berhasil)* .

B. REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA 2018-2023

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Dua Boccoe 2018 – 2023. Adapun realisasi dan capaian kinerja Kecamatan Dua Boccoe apabila disandingkan dengan tahun sebelumnya, diperoleh matrik sebagai berikut:

Tabel 3.2 Realisasi Kinerja Tahun 2018-2020

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		
			2018	2019	2020
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	90	92	94
		Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/ditangani	75	80	85
		Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa	47	52	55
	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan	90	92	94
		Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Perda	75	80	85

Sumber Data: Dokumen Renstra Tahun 2018-2023 Kec. Dua Boccoe

3.3 Realisasi Kinerja Tahun 2019–2023

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Awal 2018	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP	C	CC	B	B	B	BB	-	-	100	-	-
		Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	90	92	94	96	98	100	-	-	104	-	-
		Rata-rata	90	92	94	96	98	100	-	-	104	-	-

Sumber Data: Dokumen Renstra Perubahan 2018–2023 Kec. Dua Boccoe

Berdasarkan Tabel 3.3 dan 3.2 di atas dapat dijelaskan bahwa hanya 1 indikator kinerja utama kecamatan Dua Boccoe yang dapat disandingkan persentase capaian kerjanya dengan Tahun sebelumnya yaitu indikator Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan. Indikator ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk indikator predikat Hasil SAKIP oleh APIP persentase capaian kerjanya belum dapat disandingkan karena merupakan IKU Baru, tetapi realisasi kinerja pada indikator ini selama kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu Tahun 2019, 2020 dan 2021 tidak mengalami peningkatan (*stagnan*) dengan Predikat B.

C. REALISASI KINERJA YANG MENGACU PADA TARGET JANGKA MENENGAH

Analisa berikutnya dalam mengatur capaian kinerja tujuan/sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Kecamatan Dua Boccoe Tahun 2018-2023 seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah Renstra 2018-2023

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Akuntabilitas Kecamatan Dua Boccoe	Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP	C	C	CC	B	-	-
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Dilaksanakan Sesuai Standar Pelayanan	90	92	94	96	-	-

Sumber Data: Renstra Perubahan Kec. Dua Boccoe 2018-2023

Berdasarkan Tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa untuk Indikator kinerja utama yang pertama Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip belum mencapai jangka menengah, sedangkan untuk indikator kedua Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai

Standar Pelayanan telah mencapai target jangka menengah, sehingga target tahun berikutnya akan disesuaikan.

D. REALISASI KINERJA DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL/STANDAR NASIONAL LAINNYA

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran strategis adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator tujuan/sasaran strategis Kecamatan Dua Boccoe dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 3.4 Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

Tujuan Strategis	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2021	Standar Nasional	
				Target 2021	Realisasi 2021
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	B	-	-
		Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	94,43	-	-

Sumber Data: Dokumen Renstra Perubahan Kec. Dua Boccoe Tahun 2021

Berdasarkan Tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa capaian indikator tujuan/sasaran strategis Kecamatan Dua Boccoe tidak dapat disandingkan dengan standard nasional karena tidak melaksanakan Standar Pelayanan Minimal/standar nasional lainnya.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran strategis kita lihat tabel ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Ikhtisar Pencapaian Capaian Kinerja

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Rata- Rata Capaian	Predikat			
				>110	90= \leq s/ d<110	60= \leq s /d<90	<60
				Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Dua Boccoe	Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP	100%	100%		✓		
					✓		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Kepada Masyarakat Yang dilaksana n Sesuai Standar Pelayanan	98,36 %	98,36 %		✓		
					✓		
Rata-Rata			99,18		✓		

Sumber Data : Dokumen Renstra Perubahan Kec.Dua Boccoe Tahun 2021

Berdasarkan data pada table 3.6, dapat disimpulkan bahwa rata-rata realisasi capaian indikator tujuan/sasaran strategis Kecamatan Dua Boccoe tahun 2021 dalam kategori *Berhasil*.

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut :

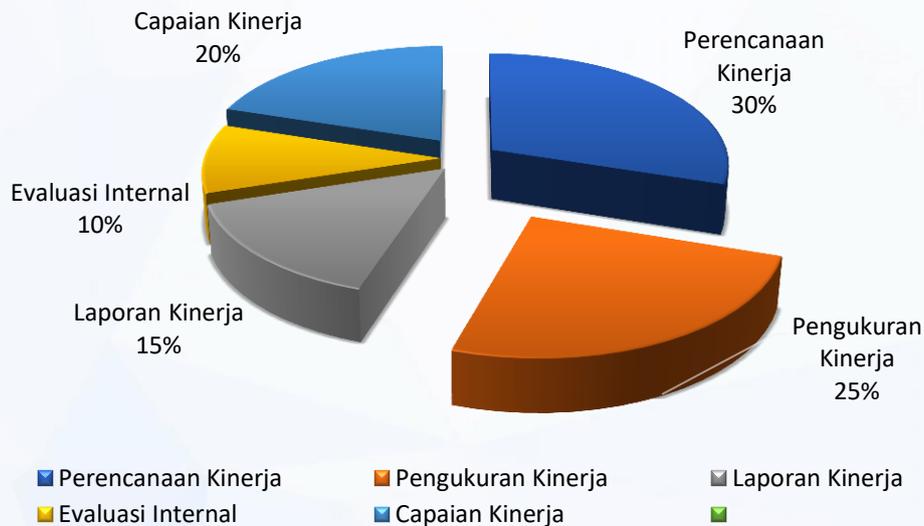
Tujuan :

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Dua Boccoe dengan indikator:

⇒ **Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP**

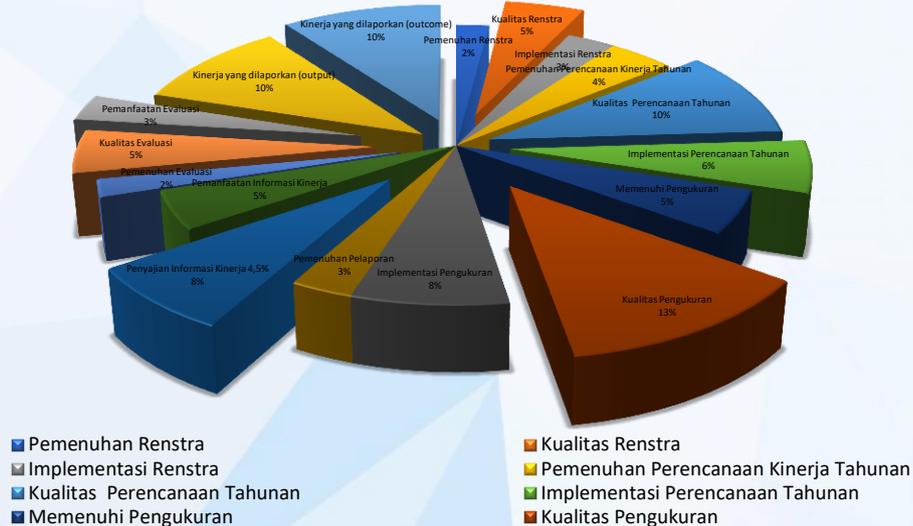
Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/ unit kerja pemerintah. Evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif Instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE . Dalam melakukan penilaian, terdapat tiga variable yaitu: komponen, sub- komponen dan kriteria sebagai berikut :

5 KOMPONEN PENILAIAN SAKIP



Sumber Data : Permenpan Nomor 12 Tahun 2015

Sub komponen Penilaian SAKIP



Sumber Data : Permenpan Nomor 12 Tahun 2015

Indikator ini diporeleh capaian kinerja 100 %, hal ini didukung oleh :

1. Perencanaan strategis telah dilakukan perubahan melalui Renstra Perubahan 20218-2023 untuk menyelaraskan Indikator Kinerja Utama



Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dengan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Dua Boccoe.

2. Telah dilakukan pengukuran kinerja secara berkala (per Triwulan).
3. Capaian Indikator kinerja Utama Kecamatan Dua Boccoe Tahun 2021 diperoleh rata – rata dengan Nilai 99,18 (Berhasil)
4. Laporan Kinerja Kecamatan Dua Boccoe menyajikan data yang informatid dan analisis yang memadai
5. Dilakukan evaluasi kinerja per Triwulan yang dipimpin oleh Camat Dua Boccoe.

Meskipun capaian kinerja mencapai 100 % terdapat beberapa kendala dalam pencapaiannya yaitu belum terdapatnya cascading kinerja pelaksana. Upaya yang telah dilakukan oleh Kecamatan Dua Boccoe untuk meningkatkan predikat SAKIP oleh APIP pada Tahun 2021 melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi Kabupaten Bone dan membuat Cascading Kinerja Jabatan Pelaksana.

Sasaran :

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator:

⇒ **Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan**

Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan adalah jumlah pelayanan public yang dilayani / ditindak lanjuti sesuai standar dibagi jumlah pelayanan publik yang masuk kali 100%. Jenis pelayanan publik pada kantor camat wilayah Kabupaten Bone :

1. Pegurusan Akta Jual Beli, Akta Hiba

2. Rekomendasi/pengesahan Surat Pengantar Permohonan SKCK
3. Rekomendasi/Pengesahan Surat Pengantar Ijin Keramaian
4. Rekomendasi/Pengesahan Surat Keterangan Domisili
5. Rekomendasi/Pengesahan Surat Pengantar KTP, Kartu Keluarga, Pindah Domisili,
6. Rekomendasi/Pengesahan Surat Permohonan SIU, SITU, IMB
7. Rekomendasi/Pengesahan Surat Permohonan Penerbitan SPPT, Balik Nama SPPT, dan Penghapusan
8. Rekomendasi/Pengesahan Surat Pengantar Nikah

Indikator ini diperoleh capaian kinerja 106 % hal ini didukung oleh :

1. Telah tersusunnya Peta Proses Bisnis Kecamatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis
2. Terdapat SOP pada setiap jenis layanan
3. Adanya tunjangan Kinerja Pegawai yang menjadi motivasi kerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
4. Telah dilakukan Bimtek Pelayanan Prima kepada beberapa ASN di Kecamatan.
5. Pengawasan dan evaluasi secara berkala oleh atasan langsung

Dalam pencapaian indikator ini meskipun 106 % diperoleh beberapa hambatan, antara lain :

1. Terjadinya pandemi Covid – 19 yang mengharuskan perubahan SOP dalam melayani masyarakat.
2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat yang tidak mengetahui standar pelayanan.

3. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik
(Alat perekaman e-KTP)

Adapun solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut, antara lain :

1. Melakukan digitalisasi pelayanan (Online)
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang standar pelayanan masyarakat
3. Melakukan pemeliharaan alat perekaman e-KTP

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Kecamatan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang dimiliki Kecamatan adalah sumber daya manusia sarana prasarana kanto rdan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2021 untuk melkasanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Kecamatan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan

Tabel 3. 6 Analisis Efisiensi Sumber Daya Kecamatan

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi Sumber Daya %
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatkan Akuntabilitas Kecamatan Dua Boccoe	Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP	B	B	100	22.639.200	22.639.200	100	-
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan Sesuai Standar Pelayan	96	94,43	98,36	755.398.800	655.844.205	86,82	11,54

Sumber : Renstra Perubahan Kecamatan Dua Boccoe 2021-2023

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan kegiatan Kecamatan Dua Boccoe terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu:

1. Indikator Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP dengan capaian kinerja 100 % dan persentase capaian realisasi anggaran 100 %, menunjukkan

bahwa tidak ada efisiensi.

- Indikator Persentase Pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan Sesuai Standar Pelayanan dengan capaian kinerja 106%, Pagu Anggaran sebesar Rp. 11.804.815.269.00 realisasi penggunaan Anggaran Rp. 11.147.582.434.00, capaian anggaran 94.43% menunjukkan bahwa terdapat efisiensi anggaran sebesar 5.57% dan efektifitas penggunaan sumber daya sebesar 100 %.

G. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Analisis terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
Meningkatkan akuntabilitas Kecamatan Dua Boccoe	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	B	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Tekhnis Perangkat Daerah	100	95.06	95.06	Perlu adanya Peningkatan Kinerja dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar Pelayanan	94	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	Perlu adanya Ketetapan Waktu dalam Hal Penyusunan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen	3	100	100	Perlu adanya Ketersediaan

			Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun				Satuan Standar Harga Sebelum Menyusun Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	100	100	Perlu adanya Ketersediaan Satuan Standar Harga Sebelum Menyusun Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	100	100	Memfaatkan Waktu Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tepat waktu
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	1	100	100	Perlu Di adakan Bimbingan Teknis bagi Penyusun Laporan LPPD dan LKPJ
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	1	100	100	diperlukan dokumen pendukung untuk menjadi bahan penyelesaian Laporan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan Periodik Perangkat Daerah secara Tepat Waktu	100	94,94	94,94	Perlu diadakan keseuaian pagu anggaran mengikuti anggaran perubahan daerah
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan beserta Tambahan Penghasilan Bulanan bagi ASN	1	94,94	94,94	Perlu diadakan keseuaian pagu anggaran supaya tidak terjadi pengembalian
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Umum Perangkat	100	97,42	97,42	Perlu adanya kelengkapan pengadministra sian umum yang memadai

				Daerah yang tersedia sesuai rencana Kebutuhan				
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penunjang Administrasi Perkantoran Sesuai Rencana kebutuhan	1	84,28	84,28	Diperlukan peralatan dan perlengkapan yang memadai sesuai dengan kebutuhan kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan (Logistik) Makanan dan Minuman bagi Pegawai dan Tamu sesuai rencana kebutuhan	1	100	100	perlu penyempurnaan Sn=tandar harga yang signifikan pada aplikasi
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sesuai rencana kebutuhan	1	100	100	pengadaan dokumen seharusnya terpusat pada satu sub kegiatan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Pembayaran Media yang menyediakan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan	12	100	100	Perlu diadakan minat baca pada pegawai asn
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rutin Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan SKPD yang diikuti	200	100	100	perlu diadakan pembagian sspd pada semua kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang tersedia sesuai Rencana Kebutuhan	100	100	100	Perlu diadakan pengusulan Barang yang sesuai dengan kebutuhan
			Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	1	100	100	Perlu adanya Pengadaan mebel yang memiliki standar

								Penggunaan yang dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan kantor
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5	100	100	Penambahan kendaraan Dinas untuk Operasional Pelayanan kepada masyarakat dan Memperlancar kegiatan Monev ke desa-desa
			Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan daerah	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang urusan Pemerintahan daerah yang tersedia sesuai rencana kebutuhan	100	99,10	99,10	Perlu adanya kesesuaian dalam pengelolaan penyediaan sarana prasarana penunjang urusan pemerintahan daerah
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik, Telepon/ Wifi dan air	48	95,69	95,69	Perlu Adanya Kesesuaian Antara Jumlah Pemakaian Daya dengan Pelayanan Kinerja yang ada setiap bulannya.
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Pelayanan Umum/administrasi Keuangan selama setahun	108	99,81	99,81	Perlu adanya Ketetapan Standar Pembayaran luran Jaminan Kesehatan Tenaga Honorer yang Merata Tiap Bulannya
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Tersedia sesuai Rencana Kebutuhan	100	99,86	99,86	Perlu diupayakan sebaik mungkin terhadap pemeliharaan Barang Milik Daerah
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Penyediaan Jasa	5	99,84	99,84	perlu dilakukan koordinasi dengan aset

			Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				terkait dengan biaya pemeliharaan kendaraan kepasd aset
			Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	100	100	diperlukan pekerja yang lebih dalam rangka pemeliharaan gedung kantor secara berkala
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	100	100	Diperlukan kerjasama antar Tim dalam proses Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam hal pelayanan Publik
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	100	100	masih perlu pembagian kerja dalam hal penyelenggaraan pemerintahan tingkat Kecamatan
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (Musrenbang) Yang Diikuti dan Dilaksanakan	1	100	100	perlu diadakan rapat Tim dalam pelayanan sppd OPD yang datang bermusrenbang
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	71,53	71,53	Diperlukan adanya kerja sama antar Tim dalam hal penyelesaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Koordinasi Kegiatan	100	18,57	18,57	Diperlukan stekholder dan pihak yang

			Desa	Pemberdayaan Desa				berkompeten dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Desa
			Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS dan TSKS	1	18,57	18,57	Perlu adanya Koordinasi dan Sinergitas antar Pokja Desa dan FKKS dalam Hal Penyusunan Laporan
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100	97,96	97,96	Diperlukan optimalisasi terhadap kegiatan pemberdayaan Desa
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Penambahan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman, Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman Lainnya Kelurahan Unyi	1	100	100	Mengkordinasikan kepada Pemerintah Kabupaten terhadap Kewenangan Kelurahan dalam Pengelolaan anggaran Pembangunan Sarana Prasarana kelurahan
			Pemberdayaan Masyarakat Di kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Terlaksana	1	93,32	93,32	perlu diadakan penyuluhan terhadap warga
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan	100	100	100	Diperlukan optimalisasi terhadap stakeholder dan pihak terkait dalam hal koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	Meningkatkan Koordinasi dengan stakeholder terkait
			Sinergitas	Jumlah	36	100	100	Perlu Diadakan

			dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Operasional Pengawasan Tripika				Rapat Kordinasi Lintas Sektor Secara Rutin dan Berkala
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa	100	100	100	Diperlukan Stakeholder dalam hal pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	100	Diperlukan partisipasi aktif bagi Kepala Desa dalam hal Pembinaan dan Pengawasan Desa
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Laporan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	21	100	100	Perlu diadakan bimbingan teknis kepada para kepala desa dalam hal penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Sumber Data : C3 Desember 2021

Berdasarkan tabel diatas tentang analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegiatan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan.

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

⇒ Indikator : Hasil evaluasi SAKIP oleh APIP

⇒ Indikator : Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan.

Program dan Sub Kegiatan Sebagai berikut :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan daerah
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK

- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Peningkatan Eektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat Di kelurahan

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - a. Upaya perbaikan
 - Perlu adanya Peningkatan Kinerja dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah

- Perlu adanya Ketetapan Waktu dalam Hal Penyusunan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Perlu adanya Ketersediaan Satuan Standar Harga Sebelum Menyusun Perencanaan Perangkat Daerah
- Memanfaatkan Waktu Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tepat waktu
- Perlu Di adakan Bimbingan Teknis bagi Penyusun Laporan LPPD dan LKPJ diperlukan dokumen pendukung untuk menjadi bahan penyelesaian Laporan
- Perlu diadakan keseuaian pagu anggaran mengikuti anggaran perubahan daerah
- Perlu diadakan keseuaian pagu anggaran supaya tidak terjadi pengembalian
- Perlu adanya kelengkapan pengadministrasian umum yang memadai
- Diperlukan peralatan dan perlengkapan yang memadai sesuai dengan kebutuhan kantor
- Perlu penyempurnaan Standar harga yang signifikan pada aplikasi
- Pengadaan dokumen seharusnya terpusat pada satu sub kegiatan
- Perlu diadakan minat baca pada pegawai asn
- Perlu diadakan pembagian sspd pada semua kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian
- Perlu diadakan pengusulan Barang yang sesuai dengan kebutuhan
- Perlu adanya Pengadaan mebel yang memiliki standar Penggunaan yang dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan kantor

- Penambahan kendaraan Dinas untuk Operasional Pelayanan kepada masyarakat dan Memperlancar kegiatan Monev ke Desa-des
- Perlu adanya kesesuaian dalam pengelolaan penyediaan sarana prasarana penunjang urusan pemerintahan daerah
- Perlu Adanya Kesesuaian Antara Jumlah Pemakaian Daya dengan Pelayanan Kinerja yang ada setiap bulannya.
- Perlu adanya Ketetapan Standar Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Tenaga Honorer yang Merata Tiap Bulannya
- Perlu diupayakan sebaik mungkin terhadap pemeliharaan Barang Milik Daerah
- Perlu dilakukan koordinasi dengan aset terkait dengan biaya pemeliharaan kendaraan kepasd aset
- Diperlukan pekerja yang lebih dalam rangka pemeliharaan gedung kantor secara berkala
- Diperlukan kerjasama antar tim dalam proses penyelenggaraan pemerintahan da lam hal pelayanan publik
- Masih perlu pembagian kerja dalam hal penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan
- Perlu diadakan rapat Tim dalam pelayanan sspd OPD yang datang bermusrenbang
- Diperlukan adanya kerja sama antar Tim dalam hal penyelesaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- Diperlukan stekholder dan pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Desa

- Perlu adanya Kordinasi dan Sinergitas antar Pokja Desa dan FKKS dalam Hal Penyusunan Laporan
- Diperlukan optimalisasi terhadap kegiatan pemberdayaan Desa
- Mengkordinasikan kepada Pemerintah Kabupaten terhadap Kewenangan Kelurahan dalam Pengelolaan anggaran Pembangunan Sarana Prasarana kelurahan
- Perlu diadakan penyuluhan terhadap warga
- Diperlukan optimalisasi terhadap stekholder dan pihak terkait dalam hal kordinasi ketentraman dan ketertiban umum
- Meningkatkan Kordinasi dengan stakeholder terkait
- Perlu Diadakan Rapat Kordinasi Lintas Sektor Secara Rutin dan Berkala
- Diperlukan Stakeholder dalam hal pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Diperlukan partisipasi aktif bagi Kepala Desa dalam hal Pembinaan dan Pengawasan Desa
- Perlu diadakan bimbingan tekhnis kepada para kepala desa dalam hal penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran belanja Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone Tahun 2021 setelah perubahan sebesar Rp.11.804.815.269,00 (Sebelas Milyar Delapan Ratus Empat Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran

URAIAN	JUMAH (RP)		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Tujuan :			
MeningkatkanKecamatan Dua Bocoe Akuntabilitas			
Sasaran :			
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			
PROGRAM:			
PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	11.371.610.769	10.809.386.933	95,06
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	11.549.500	11.549.500	100
PROGRAM MASYARAKATKELURAHAN PEMBERDAYAAN DESA DAN KELURAHAN	335.520.000	239.991.001	71,53
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	33.135.000	33.135.000	100,00
PROGRAM KETENTRAMAN UMUM KOORDINASI DAN KETERTIBAN	33.000.000	33.000.000	100,00
Total	11.804.815.269,00	11.147.582.434,00	94,43

Sumber data : C3 Desember 2021



BAB IV

PENUTUP

BAB IV
PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

A. KESIMPULAN UMUM

Pencapaian indikator kinerja utama Kecamatan Dua Boccoe dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan dan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik pada tahun anggaran 2021 diperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 99,18 % kategori *berhasil*.

B. KENDALA PELAKSANAAN DAN UPAYA MENGATASI

KENDALA PELAKSANAAN

Terjadinya pandemi Covid – 19 yang mengharuskan perubahan SOP dalam melayani masyarakat.

Masih kurangnya pemahaman masyarakat yang tidak mengetahui standar pelayanan.

Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik (Alat perekaman e-KTP)

UPAYA MENGATASI

Menyesuaikan SOP dalam melayani Masyarakat terhadap Dampak Covid-19

Adapun solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut, antara lain:

- Melakukan digitalisasi pelayanan (Online)
- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang standar pelayanan masyarakat
- Melakukan pemeliharaan alat perekaman e-KTP

Lampiran

Lampiran

secara lengkap dapat diakses dengan memindai QR Barcode berikut:



Uloe, 9 Februari 2021
Camat Dua Boccoe



ANDY MUSAFIR, S. Pi

Pangkat: Pembina
NIP.19720304201001